

Partisipasi guru SMP pada penerapan kawasan tanpa rokok: studi komparasi di Kabupaten Sleman dan Kulonprogo

Teacher participation in implementing non-smoking areas policy: a comparative study in Sleman and Kulonprogo districts

Arie Kurniardi¹ & Yayi Suryo Prabandari¹

Abstract

Diterima: 13 Juni 2017
Diterbitkan: 1 November 2017

Purpose: This study aimed to explore the difference of participation in non-smoking areas implementation among junior high school teachers in Kulon Progo and Sleman. **Methods:** This research used a cross-sectional study design. The samples in this study were the junior high school teachers from Kulon Progo and Sleman District. The analysis used independent sample t-tests. **Results:** There was no significant difference in knowledge level, self-efficacy, smoking status and school policy in Kulon Progo and Sleman districts. There was a difference in accessibility level of information about smoking ban and teacher participation to implement non-smoking areas in Kulon Progo and Sleman. **Conclusion:** The most dominant factor that influenced the participation of junior high school teachers towards the implementation of nonsmoking areas in Kulon Progo Regency and in Sleman District of Yogyakarta is the accessibility of information about smoking ban.

Keywords: teacher; smoking behavior; school; non-smoking area

¹Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada (Email: kurniardi86@gmail.com)

PENDAHULUAN

Masalah rokok memang selalu menjadi pusat perhatian, tidak hanya secara nasional, bahkan secara internasional. Dampak yang terjadi menyangkut berbagai aspek khususnya aspek kesehatan yang jelas sangat mudah terpapar oleh rokok (1).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan perilaku merokok usia 15 tahun ke atas di Indonesia cenderung meningkat sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. Pada tahun 2007, perilaku merokok berada pada angka 34,2%, pada tahun 2010 pada angka 34,7%, kemudian pada tahun 2013 menjadi 36,3%. Hasil Riskesdas tahun 2013 juga menunjukkan bahwa khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, proporsi perokok aktif sebesar 21% (2).

Pemerintah sebagai pelindung dan pembuat regulasi memiliki tanggung jawab dalam pengendalian bahaya rokok. Pengendalian tidak akan efektif tanpa disertai sanksi atas perilaku yang menyimpang. Sesuai dengan rekomendasi dari *Tobacco Control Support Center* (TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat yang bekerjasama dengan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) dan WHO Indonesia, beberapa alternatif kebijakan dalam pengendalian tembakau adalah mengimplementasikan 100% kawasan tanpa rokok (KTR) di tempat umum, tempat kerja dan tempat pendidikan (3).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebenarnya telah memperhatikan masalah rokok sejak tahun 2007, terlihat dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Ibu hamil, anak berusia kurang dari 5 tahun, dan anak yang mengenakan seragam sekolah tidak boleh memasuki tempat khusus untuk merokok (4).

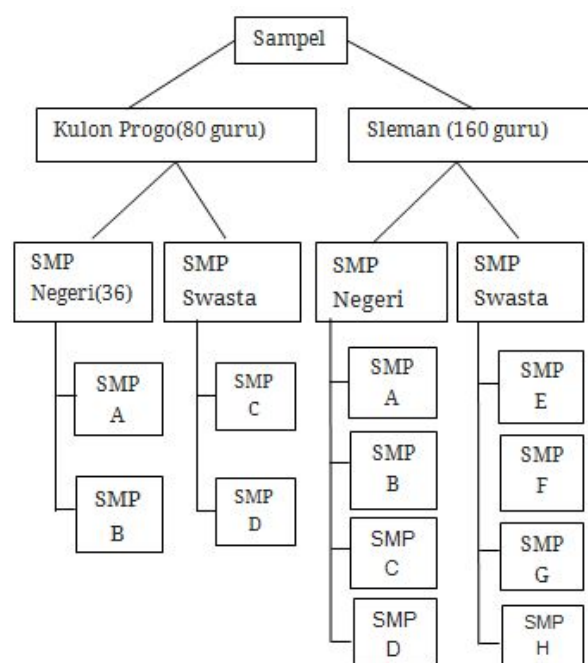
Kabupaten Kulonprogo adalah daerah yang pertama kali menerbitkan peraturan daerah tentang KTR, diawali dengan terbitnya peraturan bupati (perbup) tentang kawasan tanpa asap rokok (5). Selang beberapa waktu perbup tersebut ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (6). Peraturan ini semakin komprehensif karena tidak hanya memuat kawasan-kawasan tanpa rokok, tetapi juga berikut larangan-larangan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

Aturan mengenai rokok telah diprakarsai oleh Dinas Kesehatan mulai tahun 2011 melalui Perbup Sleman Nomor 42. Perbup Sleman tersebut meliputi ketentuan KTR namun Kabupaten Sleman sampai saat ini masih belum mengimplementasikan Perda kawasan tanpa rokok. Hal ini karena pihak legislatif yang membahas Raperda KTR sempat terbengkalai.

Partisipasi guru dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah sangat menentukan sebagai salah satu upaya pengendalian konsumsi rokok. Tidak hanya itu, partisipasi ini sangat berdampak besar untuk menjaga kesehatan baik pada perokok aktif maupun perokok pasif, khususnya di lingkungan sekolah. Guru harus memiliki rasa tanggung-jawab dan bersedia turut berpartisipasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di sekolah (7). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan partisipasi terhadap penerapan kawasan tanpa rokok antara guru SMP di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.

METODE

Penelitian *cross-sectional* ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Kabupaten Kulon Progo adalah daerah yang telah menerapkan Perda KTR dan Kabupaten Sleman adalah daerah yang belum menerapkan Perda KTR. Populasi penelitian ini adalah semua guru SMP di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Jumlah SMP se-Kabupaten Kulon Progo sebanyak 66 sekolah yang terdiri dari 36 sekolah negeri dan 30 sekolah swasta. Jumlah guru SMP se-Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.344 orang. Jumlah SMP se-Kabupaten Sleman sebanyak 110 sekolah yang terdiri dari 55 sekolah negeri dan 55 sekolah swasta. Jumlah guru SMP se-Kabupaten Sleman sebanyak 2.705 orang.



Gambar 1. Sebaran jumlah sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan *multi-stage random sampling*. Jumlah guru yang dijadikan sampel diambil berdasarkan proporsi jumlah guru dari sekolah negeri dan sekolah swasta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang Perda KTR, efikasi diri, status merokok, kebijakan sekolah, aksesibilitas dan partisipasi guru. Analisis data yang dilakukan menggunakan program STATA untuk menguji hipotesis.

HASIL

Analisis univariabel digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti dan data demografi. Hasil analisis univariabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi demografi responden

Kategori	Kulon Progo	Sleman	Total
Jenis Kelamin			
Pria	21 (26,3%)	65 (40,6%)	86 (35,8%)
Wanita	59 (73,8%)	95 (59,4%)	154 (64,2%)
Usia			
21-30 tahun	8 (10,0%)	27 (16,9%)	35 (14,6%)
31-40 tahun	11 (13,8%)	26 (16,3%)	37 (15,4%)
41-50 tahun	32 (40,0%)	31 (19,4%)	63 (26,3%)
51-60 tahun	28 (35,0%)	74 (46,3%)	10 (42,5%)
61-70 tahun	1 (1,3%)	2 (1,3%)	3 (1,3%)
Pendidikan			
Diploma/Sarjana	73 (91,3%)	140 (87,5%)	213 (88,8%)
Pasca Sarjana	3 (3,8%)	14 (8,8%)	17 (7,1%)
Lainnya	4 (5,0%)	6 (3,8%)	10 (4,2%)
Total	80 (33,3%)	160 (66,7%)	240 (100%)

Penelitian ini menemukan sebanyak 208 (86,7%) responden untuk variabel pengetahuan termasuk dalam kategori tinggi. Begitu juga untuk variabel efikasi diri, sebanyak 179 (74,6%) responden termasuk dalam kategori tinggi. Responden yang tidak merokok sebanyak 216 (90%). Pada variabel kebijakan sekolah, sebanyak 209 (87,1%) termasuk dalam kategori tinggi. Begitu juga untuk variabel aksesibilitas, sebanyak 134 (55,8%) termasuk dalam kategori tinggi, dan sebanyak 87 (36,3%) termasuk dalam kategori tinggi untuk variabel partisipasi guru.

Sebagian besar jawaban responden mengenai variabel-variabel penelitian termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut sesuai hasil deskripsi, dengan sebanyak 208 (86,7%) responden untuk variabel pengetahuan termasuk dalam kategori tinggi. Begitu juga untuk variabel efikasi diri, sebanyak 179 (74,6%) responden termasuk dalam kategori tinggi. Responden yang tidak merokok sebanyak 216 (90%). Pada variabel kebijakan sekolah, sebanyak 209 (87,1%) termasuk dalam kategori tinggi. Begitu juga untuk variabel

aksesibilitas, sebanyak 134 (55,8%) termasuk dalam kategori tinggi, dan sebanyak 87 (36,3%) termasuk dalam kategori tinggi untuk variabel partisipasi guru.

Hasil analisis bivariabel disajikan pada Tabel 2. Penelitian ini menemukan perbedaan aksesibilitas paparan informasi tentang larangan merokok di Kabupaten Kulon Progo dan SMP di Kabupaten Sleman DIY. Partisipasi guru di Kabupaten Kulon Progo dan SMP di Kabupaten Sleman untuk menerapkan kawasan tanpa rokok berbeda secara statistik.

Tabel 2. Hasil analisis bivariabel

Variabel	Grup	Mean	Std. Dev	t-hitung	Sig.
Pengetahuan tentang KTR	Kulon Progo	9,05	1,756	-0,168	0,867
	Sleman	9,09	1,567		
	Combined	9,075	1,629		
Efikasi Diri	Kulon Progo	44,087	7,022	0,723	0,470
	Sleman	43,4	6,897		
	Combined	43,629	6,932		
Status merokok	Kulon Progo	0,137	0,346	1,369	0,172
	Sleman	0,081	0,274		
	Combined	0,1	0,300		
Kebijakan sekolah	Kulon Progo	6,9	0,376	1,659	0,098
	Sleman	6,718	0,939		
	Combined	6,779	0,800		
Paparan informasi	Kulon Progo	3,512	1,113	3,241	0,001
	Sleman	2,85	1,649		
	Combined	3,071	1,522		
Partisipasi guru	Kulon Progo	10,475	3,471	1,995	0,047
	Sleman	9,519	3,514		
	Combined	9,837	3,521		

Analisis Multivariabel. Analisis multivariabel menggunakan uji *logistic regression*. Hasil analisis multivariabel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis multivariabel

Variabel	Koefisien	Std. Error	Sig.
Pengetahuan KTR	-0,094	0,095	0,320
Efikasi	0,014	0,023	0,547
Status merokok	0,501	0,458	0,273
Kebijakan sekolah	0,217	0,224	0,332
Aksesibilitas	0,291	0,118	0,013
Partisipasi guru	0,026	0,048	0,585

Penelitian ini menemukan faktor yang paling dominan memengaruhi partisipasi guru SMP terhadap penerapan KTR di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman adalah aksesibilitas

BAHASAN

Pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menemukan tingkat pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok di kedua kabupaten sudah baik. Namun, tidak terdapat perbedaan bermakna antara pengetahuan guru SMP di Kabupaten Kulon Progo dan guru SMP di Kabupaten Sleman DIY.

Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2011 mulai menerapkan KTR. Penerapan KTR di Kabupaten Sleman didukung masyarakat dan organisasi setempat (9). Hasil dari penelitian tersebut turut menjelaskan bahwa di kedua kabupaten telah memiliki pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok yang baik.

Efikasi Diri. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan efikasi diri antara guru SMP di Kabupaten Kulon Progo dan guru SMP di Kabupaten Sleman DIY. Efikasi diri guru SMP di kedua kabupaten tersebut sudah baik. Efikasi diri sebagai keyakinan seseorang dapat menahan perilaku merokok dan secara teori berhubungan positif dengan perilaku tidak merokok. Ada korelasi positif yang kuat antara efikasi diri dan menghindari merokok (10). Penelitian sebelumnya menemukan pengaruh pelatihan manajemen diri terhadap perilaku merokok (11). Kesimpulan tersebut memperkuat hasil penelitian ini. Manajemen diri berpengaruh pada perilaku merokok sehingga dapat meningkatkan penertiban kawasan tanpa rokok.

Status merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan status merokok antara guru SMP di Kabupaten Kulon Progo dan guru SMP di Kabupaten Sleman DIY. Tinggi persentase responden yang tidak merokok tersebut menunjukkan bahwa kesadaran guru SMP di kedua kabupaten terhadap bahaya merokok sangat baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan penurunan proporsi merokok sejak peraturan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2007 untuk pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok ditetapkan di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. Setelah dijabarkan oleh peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang ketetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dapat diprediksi hingga tahun 2017 status merokok menjadi semakin baik. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari tinggi persentase responden yang tidak merokok pada komunitas guru dari kedua kabupaten tersebut.

Kebijakan sekolah. Penelitian ini tidak menemukan perbedaan kebijakan sekolah (SMP) di Kabupaten Kulon Progo dan SMP di Kabupaten Sleman DIY. Kebijakan sekolah di kedua kabupaten terhadap kawasan tanpa rokok KTR sudah baik. Kebijakan

kawasan tanpa rokok di tempat pendidikan dianggap efektif untuk mengurangi paparan asap rokok (12).

Aksesibilitas paparan informasi tentang larangan merokok. Aksesibilitas dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat kemudahan terhadap paparan informasi tentang larangan merokok di sekolah antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Penelitian ini menemukan perbedaan aksesibilitas paparan informasi tentang larangan merokok di Kabupaten Kulon Progo dan SMP di Kabupaten Sleman DIY. Aksesibilitas paparan informasi di Kulon Progo lebih tinggi dari nilai aksesibilitas paparan informasi di Sleman.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi adalah faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor birokrasi. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 di SMK se-Kecamatan Wates adalah ketiadaan tim pengawas kawasan tanpa rokok dan partisipasi masyarakat sekitar sekolah yang kurang (13). Hasil tersebut menunjukkan bahwa peraturan tentang KTR di Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan dengan baik.

Partisipasi guru. Terdapat perbedaan partisipasi guru untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Kulon Progo dan SMP di Kabupaten Sleman DIY. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa sebagian besar partisipasi guru di Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan partisipasi guru di Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori sedang.

Guru diharapkan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan KTR di sekolah sebagai upaya dalam merespon kebijakan KTR yang berlaku di daerahnya. Faktor internal seperti manajemen diri berhubungan dengan perilaku merokok. Kesimpulan penelitian terdahulu itu memperkuat hasil penelitian ini bahwa partisipasi guru dengan melakukan pelatihan manajemen diri terhadap para siswa dapat berpengaruh terhadap perilaku merokok sehingga berpengaruh juga terhadap penertiban kawasan tanpa rokok di sekolah.

Faktor paling dominan. Faktor paling dominan terhadap penerapan KTR di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman adalah aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemampuan paparan informasi tentang larangan merokok. Penilaian aksesibilitas dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya larangan merokok di sekolah, informasi tentang larangan merokok berada di tempat yang mudah

terlihat atau tidak, ada tidaknya informasi terkait dengan larangan merokok terbaca dengan jelas, ada tidaknya peringatan larangan merokok di setiap ruang kelas, dan ada tidaknya leaflet tentang bahaya rokok di lingkungan sekolah. Nilai aksesibilitas tinggi menunjukkan telah terjadi kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan pihak sekolah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber bahwa penerapan kawasan tanpa rokok di masing-masing pada dasarnya tidak memiliki pedoman sebagai informasi untuk melakukan tugas.

SIMPULAN

Faktor paling dominan memengaruhi partisipasi guru SMP terhadap penerapan KTR di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman DIY adalah aksesibilitas paparan informasi tentang larangan merokok. Dinas kesehatan perlu mendorong diseminasi informasi tentang peraturan daerah bebas rokok untuk guru sekolah menengah pertama.

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan partisipasi terhadap penerapan kawasan tanpa rokok antara guru SMP di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman DIY. **Metode:** Penelitian ini adalah *cross-sectional*. Sampel dalam penelitian ini adalah guru SMP yang diambil dari SMP di Kabupaten Kulon Progo dan SMP dari Kabupaten Sleman. Analisis data penelitian menggunakan uji *independent sample t-test*. **Hasil:** Tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan, efikasi diri, status merokok, dan kebijakan sekolah (SMP) di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman DIY. Terdapat perbedaan tingkat aksesibilitas paparan informasi tentang larangan merokok dan partisipasi guru untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di SMP Kabupaten Kulon Progo dan Sleman DIY. **Implikasi Praktis:** Dinas kesehatan perlu mendorong diseminasi informasi tentang peraturan daerah bebas rokok untuk guru sekolah menengah pertama. **Simpulan:** Faktor paling dominan memengaruhi partisipasi guru SMP terhadap penerapan KTR di Kabupaten Kulon Progo dan di Kabupaten Sleman DIY adalah aksesibilitas paparan informasi tentang larangan merokok.

Kata kunci: guru; kebiasaan merokok; sekolah; kawasan tanpa rokok

PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; 2010.
2. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Riset Kesehatan Dasar. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Jakarta; 2013.
3. TCSC. Indonesia Tobacco Atlas Edisi 2013. Tobacco Control Support Center-Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Jakarta; 2013
4. Peraturan Daerah Provinsi D.I Yogyakarta nomor 5 tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
5. Peraturan Gubernur D.I Yogyakarta nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 5 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
7. Christina I, Juanita R. Pengaruh pengetahuan dan sikap guru dan siswa tentang rokok dan kebijakan kawasan tanpa rokok terhadap partisipasi dalam penerapan kawasan tanpa rokok di SMP Negeri 1 Kota Medan tahun 2012. Jurnal Kebijakan, Promosi Kesehatan dan Biostatistika. 2012;1(1):1-9.
8. Creswell JW. Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 2002.
9. Rahajeng E. Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Jurnal Ekologi Kesehatan. 2015 Jan 9;14(3):238-49.
10. Mee, S. Self-Efficacy: A Mediator of Smoking Behavior and Depression among College Students. PEDIATRIC NURSING. January-February 2014/Vol. 40/No. 1. 9-37.
11. Puspitasari H, Wuryaningsih EW, Rifai A. Pengaruh Pelatihan Manajemen Diri terhadap Perilaku Merokok pada Remaja Di SMK Negeri 2 Jember Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember (The Effect of Self-Management Training on Teenager's Smoking Behavior at SMK Negeri 2 Jember of Sumpalsari Sub-District Jember Regency). Pustaka Kesehatan. 2017 Feb 7;5(1):91-8.
12. McCammon-Tripp L, Stich C. Region of Waterloo Public Health and Waterloo Region Housing Smoke-Free Multi-Unit Dwelling Committee. The development of a smoke-free housing policy in the Region of Waterloo: Key success factors and lessons learned from practice. Toronto, Canada: Program Training and Consultation Centre, LEARN Project. 2010.
13. Lestari, S. Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates. E-Journal. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta; 2016

